KAJIAN KELEMBAGAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR KAWASAN DAERAH PERLINDUNGAN LAUT MASYARAKAT DI KABUPATEN WAKATOBİ

Oleh:

Samsul Alam Fyka dan La Ode Kasno Arif¹⁾

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui ketersediaan dan pengelolaan kelembagaan masyarakat pesisir kawasan daerah perlindungan laut dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat di kabupaten wakatobi Pendekatan studi yang digunakan dalam kegiatan ini secara umum yaitu pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Teknik analisis ini menggunakan pendekatan kualitatif yakni mendeskripsikan data-data yang diperoleh sehingga dapat diketahui kondisi eksisting yang sesuai dengan keadaan saat penelitian ini dilaksanakan. Komponen-komponen yang dianalisis dengan pendekatan ini adalah kondisi sosial masyarakat sekitar kawasan DPL dan kondisi kelembagaan yang ada di sekitar kawasan DPL. Hasil penelitian ini adalah penataan dan manajemen kelembagaan yang mengelola wilayah DPL harus dapat ditingkatkan lagi. Peran dan fungsi kelembagaan pengelola kawasan DPL dapat dikaji kembali sehingga dalam menjalankan tugas-tugas dan perannya dapat memperbaiki kehidupan sosial maupun ekonomi masyarakat utamanya mereka yang bermukim di sekitar wilayah DPL. Solusi yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir adalah mencanangkan program-program pemberdayaan kepada nelayan. Pemberdayaan yang dapat dilakukan adalah dengan pengembangan mata pencaharian alternatif, peningkatan akses modal bagi nelayan, peningkatan terhadap akses teknologi baik teknologi penangkapan/budidaya maupun teknologi pengolahan hasil perikanan, memfasilitasi nelayan untuk memperoleh pasar yang layak, dan pengembangan aksi kolektif atau kelompok usaha bersama.

Kata Kunci : Kelembagaan, DPL, Pemberdayaan, Masyarakat Pesisir

PENDAHULUAN

Daerah perlindungan laut berbasis masyarakat merupakan pendekatan yang umum diterapkan pada program kelembagaan sumberdaya pesisir dan laut di dunia terutama di negara - negara berkembang yang memiliki ekosistem terumbu karang. DPL dianggap sebagai manifestasi dari keinginan masyarakat memenuhi kebutuhannya, seperti kebutuhan untuk menikmati, memanfaatkan sumberdaya alam secara lestari, kebutuhan untuk menikmati keindahan alam dan kebutuhan untuk melindungi hak sebagai pemilik sumberdaya dari pengguna luar (Faiza, 2011).

DPL merupakan salah satu alternatif konservasi suatu kawasan laut di tingkat desa yang diyakini akan memiliki dampak penting jangka menengah dan panjang

¹⁾ Staf Pengajar Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo, Kendari

dalam upaya melestarikan sumberdaya alam laut dan sekaligus meningkatkan kondisi sosi-ekonomi sebagai hasil dari peningkatan produksi perikanan yang meningkatkan pendapatan dan ketahanan pangan (Parks et al, 2011).

Upaya pelestarian dan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga pelestarian sumberdaya laut untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat pesisir dituhkan adanya sebuah kelembagaan. melalui wadah kelembagaan itulah semua pihak berkepentingan dapat bersama - sama mengkaji masalah -masalah yang dihadapi sekaligus mencari jalan keluarnya. Sebenarnya sudah sejak lama masyarakat memiliki kelembagaan lokal yang berfungsi menjadi wadah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan mereka. Namun, kelembagaan lokal tersebut dianggap belum mampu berjalan maksimal dalam mendukung aktivitas masyarakat pesisir dalam kawasan DPL. Peran kelembagaan masyarakat sangat penting dalam menjaga kelestarian wilayah pesisir, karena sebagian kawasan pesisir sering dijadikan lahan garapan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir merupakan tanggungjawab utama dalam program pembangunan sumberdaya manusia di wilayah pesisir. Keberdayaan masyarakat desa dapat dilihat dari adanya daya dan kemampuan masyarakat itu sendiri didalam mengelola dan memanfaatkan sumber-sumber ekonomi yang tersedia di wilayahnya. Daya dukung utama masyarakat di wilayah pesisir untuk bisa berdaya dapat dilihat dari aspek fisik dan material, ekonomi, kelembagaan, serta kerjasama antar masyarakat dalam membangun kekuatan untuk bisa menolong dirinya sendiri yang didasari dengan penerapan prinsip-prinsip pemberdayaan. Kemampuan berdaya mempunyai arti yang sama dengan kemandirian masyarakat. Terkait dengan program pembangunan, bahwa tujuan yang ingin dicapai adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan terkait pengelolaan sumberdaya yang berpotensi sebagai faktor pengungkit keberdayaannya.

Keberdayaan masyarakat dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif masyarakat yang difasilitasi dengan adanya pelaku pemberdayaan. Sasaran utama pemberdayaan masyarakat adalah mereka yang lemah dan tidak memiliki daya, kekuatan atau kemampuan mengakses sumberdaya produktif atau masyarakat yang

terpinggirkan dalam pembangunan. Tujuan akhir dari proses pemberdayaan masyarakat adalah untuk memandirikan warga masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidup keluarga dan mengoptimalkan sumberdaya yang dimilikinya.

Ketersediaan kelembagaan dalam aktifitas sosial ekonomi masyarakat pesisir sangat dibutuhkan, khususnya kelembagaan yang keberadaannya sangat dibutuhkan dalam pengelolaan DPL di kabupaten Wakatobi. Dari uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang analisis Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Kawasan Daerah Perlindungan Laut di Kabupaten Wakatobi.

METODE PENELITIAN

Pendekatan studi yang digunakan dalam kegiatan ini secara umum yaitu pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kelengkapan data dan informasi baik yang bersumber dari Pemerintah Daerah, swasta dan terutama data sosial ekonomi yang diperoleh langsung berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat di sekitar kawasan DPL. Penentuan lokasi kegiatan didasarkan pada wilayah kecamatan yang memiliki kawasan DPL dan mengambil sampel wilayah berdasarkan desa/kelurahan. Adapaun wilayah dalam kajian sosial ekonomi masyarakat sekitar Kawasan DPL Kabupaten Wakatobi. Teknik penentuan responden atau sampel dalam kajian ini dilakukan secara proporsional dengan mengambil sampel sebanyak 10 persen dari jumlah penduduk setiap desa/kelurahan. Teknik analisis ini menggunakan pendekatan kualitatif yakni mendeskripsikan data-data yang diperoleh sehingga dapat diketahui kondisi eksisting yang sesuai dengan keadaan saat penelitian ini dilaksanakan. Komponen-komponen yang dianalisis dengan pendekatan ini adalah kondisi sosial masyarakat sekitar kawasan DPL dan kondisi kelembagaan yang ada di sekitar kawasan DPL.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelembagaan Masyarakat Sekitar Kawasan DPL

Keberadaan kelembagaan dalam suatu kawasan baik berbentuk kelembagaan sosial maupun kelembagaan ekonomi sangat dibutuhkan terutama dalam mendukung eksisnya aktifitas sosial ekonomi masyarakat. Pada periode pelaksanaan penetapan kawasan DPL telah dibentuk beberapa lembaga yang khusus untuk menjalankan

program-programnya. Eksisnya kelembagaan tersebut membawa dampak positif terutama bagi penyadaran masyarakat sekitar DPL tentang pentingnya melindungi kawasan perairan khususnya DPL.

Ketersediaan Lembaga Pengelola Kawasan DPL

Kelembagaan yang dibentuk pada periode tahun 2008-2011 di Kabupaten Wakatobi telah berjalan dengan cukup baik yang ditandai oleh terangkatnya 107 tenaga lapangan dengan rincian: *Senior Extension and Training Officer (SETO)* sebanyak 7 orang, *Community Facilitator (CF)* sebanyak 20 orang dan *Motivator Desa (MD)* yang berjumlah 80 orang dimana setiap satu desa ditempatkan dua orang MD. Selain itu pula dibentuk kelembagaan yang mengelola secara khusus kawasan DPL, seperti LPSTK dengan keanggotaannya terdiri dari kelompok masyarakat (konservasi, gender dan produksi) dan LKM yang dibentuk ditingkatan desa telah terbentuk di keseluruhan desa binaan.

Selain itu pula, ada beberapa lembaga di lingkup kabupaten hingga di desa dapat menjadi mitra dan selama ini telah melibatkan kelembagaannya dalam upaya konservasi wilayah perairan terutama di kawasan DPL. Lembaga-lembaga tersebut adalah diantaranya ialah Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Wakatobi, Pemerintah Kecamatan, pemerintah desa sebagai lembaga tertinggi di desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) yang terdiri dari tokoh-tokoh kemasyarakatan yang berfungsi sebagai perwakilan masyarakat dalam urusan perencanaan pembangunan di desa.

Kondisi Eksisting dan Peran Lembaga Pengelola Kawasan DPL

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan pada 15 desa kawasan DPL, dengan mewawancarai beberapa orang pengurus kelembagaan yang dibentuk diperoleh keterangan bahwa saat ini kondisi eksisting kelembagaan yang ada tidak seaktif dulu atau saat masih berjalannya program yang dijalankan oleh COREMAP phase II. Berakhirnya masa program COREMAP phase II sejak tahun 2011, diikuti pula dengan penurunan kinerja perangkat lembaga pengelola kawasan DPL. Meskipun demikian, responden yang diwawancarai menjelaskan bahwa dampak dari pelaksanaan program-program COREMAP phase II masih dirasakan manfaat positifnya oleh masyarakat sasaran programnya. Salah satunya adalah pembentukan DPL di beberapa

kawasan se Kabupaten Wakatobi yang statusnya hingga saat ini masih tetap terjaga kelestariannya sehingga fungsinya sebagai sentral bank ikan benar-benar dinikmati oleh masyarakat terutama .bagi mereka yang bermukim di sekitar kawasan DPL.

Hasil evaluasi kebijakan pengelolaan Daerah Perlindungan Laut (DPL) berbasis masyarakat yang telah dibentuk di Kabupaten Wakatobi, diidentifikasi bahwa rata-rata penutupan karang hidup dan kelimpahan ikan cenderung meningkat namun tidak signifikan. Meskipun demikian, setiap desa yang menjadi sasaran pengembangan, khususnya dilokasi DPL diketahui bahwa kondisi terumbu karang lebih baik karena adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya DPL sebagai bank ikan. Masyarakat menyadari bahwa secara tidak langsung program dan kegiatan yang berlangsung di setiap desa memberikan manfaat positif terhadap DPL dengan berkurangnya penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti penggunaan bom ikan dan obat bius, dan meningkatnya pengetahuan masyarakat sekitar kawasan DPL tentang pentingnya ekosistem terumbu karang.

Secara umum, keterlibatan Lembaga Pengelola Sumberdaya Terumbu Karang (LPSTK) melalui Pokmas bidang konservasi yang memiliki kewenangan menjaga DPL telah melaksanakan tugasnya dengan baik, namun karena masalah sarana seperti perahu motor yang tersedia belum memadai sehingga lini biasa diabaikan oleh beberapa kelompok pengelola di beberapa lokasi atau kawasan DPL.

Kelembagaan yang telah terbentuk di desa merupakan bagian dari lembaga yang paling berperan dalam pengelolaan kawasan DPL yakni pemerintah desa, BPD dan kelompok pengelola atau lembaga resmi lainnya yang ada di desa. Demikian pentingnya kelembagaan ini sehingga merupakan lembaga penggerak utama pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sumberdaya wilayah lokasi, khususnya pengelolaan DPL Kabupaten Wakatobi yang tersebar di 15 desa lokasi sampling. Untuk itu pembagian peran dan tugas lembaga-lembaga tersebut perlu dijabarkan secara rinci dan perbaikan manajemen operasional kelembagaan. Peran dan tugas lembaga-lembaga tersebut antara lain:

1. Pemerintah Desa

Pelaksanaan Rencana Pengelolaan DPL di tingkat desa di bawah koordinasi dan pengawasan dari kepala desa bersama dengan Badan Perwakilan Desa (BPD). Aparat pemerintah desa yang juga menunjang yaitu sekretaris desa, kepala-kepala urusan

dan kepala-kepala dusun. Pemerintah desa menerima pertanggungjawaban kegiatan yang dikelola oleh badan dan kelompok pengelola DPL, namun harus mempertanggungjawabkan semua kebijakan dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada BPD yang mewakili masyarakat desa secara keseluruhan. Kepala desa mengkoordinir pelaksanaan musyawarah pembangunan desa (MUSBANGDES) bersama BPD.

2. Badan Perwakilan Desa (BPD)

Badan Perwakilan Desa (BPD), merupakan badan yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang dipilih oleh masyarakat sebagai perwakilan masyarakat dalam perencanaan kegiatan pembangunan di desa. BPD bersama pemerintah desa melaksanakan kegiatan perencanaan dan membuat aturan-aturan desa.

3. Badan Pengelola

Badan Pengelola adalah badan pelaksana rencana pengelolaan DPL di tingkat desa yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang dipilih dan dipercaya oleh masyarakat melalui suatu musyawarah umum. Musyawarah pemilihan pengurus dan anggota Badan Pengelola DPL dilaksanakan oleh pemerintah desa dan BPD dengan jangka waktu kepengurusan tertentu (5 tahun) atau sesuai kebutuhan masyarakat. Badan Pengelola DPL bertanggung jawab kepada pemerintah desa (kepala desa) dan BPD. Peran dan tugas Badan Pengelola DPL adalah :

- a. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan mengkoordinasikan dengan instansi-instansi terkait dan masyarakat dalam musyawarah pembangunan desa dan rapat koordinasi lainnya;
- b. Monitoring dan evaluasi rencana pengelolaan DPL, termasuk melakukan penetapan anggaran dan musyawarah tahunan;
- c. Merekomendasikan perbaikan dan perubahan rencana pengelolaan DPL sesuai dengan kondisi aktual;
- d. Mendorong kerjasama dan koordinasi di antara masyarakat, kelompok pengguna, pengusaha, dan instansi terkait untuk menerapkan prioritas dalam melaksanakan rencana pengelolaan DPL dan mengembangkan rencana aksi tahunan;
- e. Melakukan pertemuan badan pengelola DPL secara rutin, minimal empat kali setahun atau sesuai dengan kebutuhan;

f. Membuat rencana kerja dan anggaran belanja tahunan untuk diusulkan dalam APPKD melalui MUSBANG/RAKORBANG, serta membuat laporan tahunan untuk disampaikan kepada kepala desa dan BPD dan disebarluaskan kepada dinas terkait, masyarakat dan pihak yang terlibat dalam kegiatan.

Berdasarkan hasil survey, aspek kelembagaan yang teridentifikasi di lokasi santara lain adalah lembaga adat OU Matahora di Desa matahora, lembaga adat (sara-hokumu) di pulau Kapota yang menjadi mitra pemerintah desa dalam memajukan pembangunan desa terutama dari sisi budaya dan keagamaan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi saat ini, lembaga dan kelompok-kelompok konservasi tidak berfungsi secara optimal dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut khususnya terumbu karang. Disamping itu, pola interaksi antar lembaga yang ada juga tidak terlalu harmonis sebagai akibat kurangnya pemahaman masing-masing pihak tentang keberadaannya di desa.

Kelembagaan formal yang ada masing-masing memegang peranan yang mempunyai keterkaitan antar sesama lembaga dalam pengelolaan kawasan DPL. Adapun peranan dan keterkaitan masing-masing lembaga dapat dilihat pada Tabel 1.1. Tabel 1. Peranandan keterkaitan BPD, Pemerintah Desa dan Kecamatan serta Instansi terkait terhadap Badan Pengelola DPL

No.	Kelembagaan	Peranan dan Keterkaitan Antar Lembaga
1.	Badan Perwakilan Desa	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu pembentukan Badan Pengelola DPL b. Konsultasi kebijakan terhadap aspirasi/ pendapat masyarakat c. Melihat dan mengkaji pelaksanaan kegiatan d. Mengusulkan kegiatan-kegiatan e. Menetapkan peraturan pemanfaatan sumberdaya bersama Kepala Desa dan Badan Pengelola f. Pengawasan terhadap Badan Pengelola g. Mengangkat dan memberhentikan pengurus Badan Pengelola h. Meminta, menerima, dan memeriksa laporan kegiatan tahunan
2.	Kepala Desa	<ul style="list-style-type: none"> a. Penanggung jawab umum kegiatan b. Pengesahan pembentukan Badan Pengelola c. Pengawasan dan pemeriksaan kegiatan d. Konsultasi program e. Penegakan hukum atas pelanggaran sesuai aturan kesepakatan masyarakat desa f. Menetapkan peraturan pengelola sumberdaya

No.	Kelembagaan	Peranan dan Keterkaitan Antar Lembaga
		bersama BPD
3.	Camat	<ul style="list-style-type: none"> a. Penasehat b. Memberikan dukungan terhadap keputusan dan peraturan desa c. Memberikan sanksi-sanksi d. Konsultasi laporan e. Pengesahan Surat Keputusan dari Kepala Desa tentang Badan Pengelola
4.	Instansi Terkait	<ul style="list-style-type: none"> a. Koordinasi dan pemberi bantuan teknis b. Monitoring dan pengawasan kegiatan c. Konsultasi kegiatan d. Pertimbangan usulan kegiatan e. Memberikan dukungan terhadap keputusan dan peraturan desa

Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan DPL

Ketidakberdayaan masyarakat pesisir secara umum termasuk Kabupaten Wakatobi di dalamnya antara lain disebabkan oleh keterbatasan mereka dalam penguasaan ilmu, teknologi, modal dan kelembagaan usaha. Berdasarkan hasil penelitian ini, paling tidak ada lima pendekatan pemberdayaan masyarakat pesisir (nelayan) yang dapat diimplementasikan. Dengan adanya kelima pendekatan ini tidak berarti bahwa pendekatan lain tidak lagi terbuka untuk diterapkan. Kelima pendekatan ini dilaksanakan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh aspirasi, keinginan, kebutuhan, pendapatan, dan potensi sumberdaya yang dimiliki, serta berpedoman pada beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan masyarakat sekitar kawasan DPL seperti yang telah diuraikan di atas. Uraian singkat tentang kelima pendekatan ini adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan Mata Pencaharian Alternatif

Pengembangan mata pencaharian alternatif dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa sumberdaya pesisir dan lautan di Wakatobi secara umum telah banyak mengalami tekanan dan degradasi. Data empiris menunjukkan bahwa sudah terlalu banyak nelayan yang berkonsentrasi di perairan tertentu termasuk nelayan di luar Wakatobi. Potensi ikan laut dan produksi yang tercapai di Wakatobi, jika memang benar estimasinya, sangat kecil kemungkinannya untuk dijadikan sebagai andalan bagi peningkatan kesejahteraan nelayan. Kalau jumlah ikan yang diperbolehkan ditangkap

betul-betul diambil semuanya maka berdasarkan perhitungan kasar secara rata-rata, nelayan sangat sulit untuk sejahtera. Dengan demikian, pengembangan mata pencaharian alternatif di Kabupaten Wakatobi menjadi pertimbangan utama demi terwujudnya keberdayaan masyarakat khususnya bagi rumah tangga nelayan di wilayah pesisir termasuk di sekitar kawasan DPL.

2. Akses Terhadap Modal

Aspek lain dari pemberdayaan nelayan adalah pengembangan akses permodalan. Aspek modal sangat penting karena pada dasarnya saat ini masyarakat pesisir, khususnya nelayan dan pembudidaya rumput laut di Wakatobi atau sekitar kawasan DPL masih terbatas dari aspek permodalan. Sifat usaha perikanan yang musiman, ketidakpastian serta resiko tinggi sering menjadi alasan keengganan pihak perbankan melayani permodalan untuk nelayan. Sifat usaha perikanan seperti ini yang disertai dengan status nelayan yang umumnya rendah dan tidak mampu secara ekonomi membuat mereka sulit untuk memenuhi syarat-syarat perbankan yang selayaknya diberlakukan seperti perlu adanya *collateral*, *insurance* dan *equity*.

3. Akses Terhadap Teknologi

Teknologi yang digunakan masyarakat pesisir, khususnya nelayan di Wakatobi pada umumnya masih bersifat tradisional. Karena itu maka produktivitas rendah dan akhirnya pendapatan rendah. Upaya meningkatkan pendapatan dilakukan melalui perbaikan teknologi, mulai dari teknologi produksi hingga pasca produksi dan pemasaran.

Berdasarkan hasil survey saat penelitian ini dilaksanakan, upaya-upaya peningkatan akses masyarakat terhadap teknologi belum banyak dilakukan. Hal ini karena adanya kesulitan untuk mengidentifikasi jenis dan tipe teknologi yang dibutuhkan masyarakat. Seringkali, justru masyarakatlah yang lebih maju dalam mencari dan mengadopsi teknologi yang diinginkan. Sehingga kadang-kadang pemerintah tertinggal. Dengan kata lain, dalam hal teknologi masyarakat lebih progresif untuk mencarinya sehingga lebih maju dari pemerintah daerah.

4. Akses Terhadap Pasar

Pasar merupakan faktor penarik dan bisa menjadi salah satu kendala utama bila pasar tidak berkembang. Karena itu maka membuka akses pasar adalah cara untuk mengembangkan usaha karena dengan tidak tersedianya pasar maka usaha perikanan masyarakat sangat terhambat perkembangannya. Untuk mengembangkan pasar bagi produk-produk yang dihasilkan masyarakat pesisir sekitar kawasan DPL maupun wilayah Wakatobi secara umum maka upaya yang dilakukan adalah mendekatkan masyarakat dengan perusahaan-perusahaan besar yang juga adalah eksportir komoditas perikanan. Untuk itu maka kontrak penjualan produk antara masyarakat nelayan dengan perusahaan ini dapat dilaksanakan. Keuntungan dari hubungan demikianyakni masyarakat mendapat jaminan pasar dan harga, pembinaan terhadap masyarakat terutama dalam hal kualitas produksi perikanan bisa dilaksanakan, serta sering kali masyarakat mendapat juga bantuan modal bagi pengembangan usaha.

5. Pengembangan Aksi Kolektif

Pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan DPL melalui pengembangan aksi kolektif sama artinya dengan pengembangan koperasi atau kelompok usaha bersama. Hanya di sini istilah yang digunakan adalah aksi kolektif yaitu untuk membuka kesempatan kepada masyarakat membentuk kelompok-kelompok yang diinginkannya yang tidak semata-mata koperasi atau kelompok usaha bersama secara umum.

KESIMPULAN

1. Penataan dan manajemen kelembagaan yang mengelola wilayah DPL harus dapat ditingkatkan lagi. Peran dan fungsi kelembagaan pengelola kawasan DPL dapat dikaji kembali sehingga dalam menjalankan tugas-tugas dan perannya dapat memperbaiki kehidupan sosial maupun ekonomi masyarakat utamanya mereka yang bermukim di sekitar wilayah DPL.
2. Solusi yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir adalah mencanangkan program-program pemberdayaan kepada nelayan. Pemberdayaan yang dapat dilakukan adalah dengan pengembangan mata pencaharian alternatif, peningkatan akses modal bagi nelayan, peningkatan terhadap akses teknologi baik teknologi penangkapan/budidaya maupun

teknologi pengolahan hasil perikanan, memfasilitasi nelayan untuk memperoleh pasar yang layak, dan pengembangan aksi kolektif atau kelompok usaha bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell. J. W., 1994. *Research Design Qualitative and Quantitative Approaches*. London: SAGE Publications.
- Faiza, 2011. *Efektifitas dan Keberlanjutan Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat*. Disertasi. Sekolah Pasca Sarjana. IPB. Bogor.
- Hidayati D, Ngadi, Chayadi R. 2011. *Pengelolaan Terumbu Karang melalui Coremap di Wakatobi*. LIPI-Coremap LIPI. Jakarta.
- Hidayat, 2013. *Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Nelayan*. Jurnal Sejarah CITRA LEKHA. Vol. XVII, No. 1 Feb 2013. Hal : 43 - 58.
- Hikmat, H. 2004. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Humaniora Utama. Bandung.
- Indarwati I, Wardana DS, 2013. *Metode Pemberdayaan Masyarakat Pesisir melalui pendekatan penguatan kelembagaan di wilayah pesisir kota Semarang*. BENEFIT. Jurnal Manajemen dan Bisnis. Vol. 17. No. 1 Juni 2013, Hal 75-88.
- Nugroho, T. 2007. *Paradigma, Model, Pendekatan Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi daerah*. FIA. Universitas Brawijaya. Malang.
- Tuwo A. 2011. *Pengelolaan Ekowisata Pesisir dan Laut: Pendekatan Ekologi, Sosial-Ekonomi, Kelembagaan, dan Sarana Wilayah*. Brilian Internasional. Surabaya (ID).
- Salman. Darmawan. 2003. *Pemberdayaan Masyarakat sebagai Kunci Keberhasilan PPK. Makalah disampaikan dalam "sosialisasi pembinaan dan pengendalian program pengembangan kecamatan (PPK) fase II dan pelatihan penguatan kinerja tim kordinasi PPK kabupaten dan pelaku PPK kecamatan"*. BPMP-SulSel. Makassar
- Yusuf, Djumran. 2013. *Studi Kelembagaan dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Telur Ikan Terbang (Kasus Desa Pallalakang Kabupaten Takalar dan Desa Pampusuang Kabupaten Polman)*. Disertasi. PPS. Unhas. Makassar.